

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional guna mewujudkan pembangunan di Indonesia. Dilihat dari beberapa perspektif kemajuan Indonesia tidak dapat terlepas dari aktivitas pengadaan barang/jasa. Salah satunya di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain.

Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan perannya dalam penyediaan barang dan jasa publik, salah satunya adalah pemerintah berupaya untuk melakukan pembenahan peraturan perundang-undangan agar penyedia barang/jasa publik dapat terhindar dari praktik persaingan yang tidak sehat. sebab praktik persaingan yang tidak sehat pengadaan barang/jasa merupakan bentuk dari inefisiensi yang dapat menghambat tujuan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Darmawan, 2018).

Manajemen suatu organisasi adalah *stewards* (pelayang/penerima amanah). Dalam hal organisasi publik, manajemen adalah pelayan masyarakat yang harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum, khususnya terhadap belanja pemerintah. Tuntutan publik terhadap efisiensi belanja pemerintah menunjukkan peningkatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Peningkatan tuntutan publik terhadap efisiensi belanja pemerintah menjadi isu global yang timbul karena

besarnya uang yang digunakan untuk belanja pemerintah dan fakta bahwa uang tersebut berasal dari rakyat (Hui *et al*, 2011). Di Indonesia, peningkatan tuntutan terhadap efisiensi belanja pemerintah juga didorong oleh anggapan bahwa tingkat kebocoran keuangan negara yang terjadi melalui belanja pemerintah sangat tinggi. Anggapan tersebut dikuatkan dengan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pegawai pemerintah dan pengusaha.

Di antara banyak hal yang menjadi penyebab perilaku korup dan kolusif pegawai pemerintah dan pengusaha adalah praktik pengadaan publik yang tidak kompetitif, termasuk pada pengadaan dengan tender. Pengadaan publik yang tidak kompetitif dapat mengurangi minat penyedia untuk ikut serta dalam tender dan memberikan peluang bagi pegawai pemerintah untuk melakukan kolusi dengan penyedia yang ikut serta. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian substansial pada anggaran pemerintah karena pemerintah mungkin akan membayar harga yang terlalu tinggi dan mangikat kontrak dengan perusahaan berkinerja buruk (Ohashi, 2009).

Salah satu bentuk kolusi yang sering terjadi pada lingkungan pengadaan publik yang tidak kompetitif adalah praktik pengaturan penawaran (*bid rigging*). *Bid rigging* merupakan salah satu bentuk perilaku kolusif dalam pengadaan publik yang dilakukan dengan cara mengatur penawaran sedemikian rupa sehingga menguntungkan peserta tertentu. Pengaturan semacam ini dilakukan dengan tujuan untuk memenangkan dan memberikan kontrak kepada salah satu peserta tender sebelum tender dilakukan atau sebelum penawaran diajukan kepada petugas pengadaan. *Bid rigging* merupakan masalah serius yang terjadi pada banyak tender pengadaan (Bajari, 2003).

Masalah yang muncul dalam pengadaan barang / jasa secara elektronik ialah telah terjadi kesalahan sistem (sistem error) di SPSE 4.4 Kementrian PUPR, dimana penyedia tidak mengakses paket paket dengan metode Konsultasi dan

metode Pra Konsultasi dan metode Pra Kualifikasi di SPSE pada tahun 2021. (LPSE, 2021)

Era globalisasi semakin berkembang di seluruh dunia, tentunya di negara Indonesia juga, dan semakin canggih pula teknologinya. Publik di haruskan mampu berusaha serta berani untuk menciptakan sebuah inovasi atau memperbaharui dengan inovasi dari publik atau layanan yang sudah dimiliki. Perkembangan teknologi mengakibatkan terjadinya kemajuan yang signifikan terhadap setiap lini kehidupan termasuk dalam pengadaan barang/jasa, yang sebelumnya pengadaan barang/jasa ini dilakukan dengan metode tawar-menawar secara langsung hingga kemudian akan mencapai kesepakatan harga. Praktik pengadaan barang/jasa tidak terlepas dari masalah penyimpangan antara pejabat pemerintah dengan perusahaan yang memenangkan tender. Dengan begitu tuntutan publik terhadap efisiensi atas belanja pemerintah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dan ternyata tuntutan tersebut bukan hanya tuntutan nasional melainkan merupakan tuntutan global yang timbul karena besarnya uang negara yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa atas belanja pemerintah (Zulfachri, 2021).

Dengan adanya sistem *e-procurement* yang diterapkan di Indonesia, penyempurnaan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah turut mengiringi kemajuan besar yang juga dicapai oleh pemerintah, yaitu pemberlakuan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem elektronik (*e-procurement*). Melalui sistem *e-procurement*, pengadaan barang/jasa yang efisiensi, efektifitas, transparan, dan akuntabel diyakini dapat tercapai.

E-procurement merupakan bentuk implementasi konsep *e-governance* di bidang pengadaan publik. *E-procurement* adalah penggunaan teknologi informasi, terutama aplikasi berbasis web, dalam setiap tahapan pengadaan publik. Ada dua bentuk *e-procurement* yang diterapkan dan dikembangkan dan

akan diterapkan di Indonesia, yaitu tender secara elektronik (*e-tendering*) dan pembelian secara elektronik (*e-purchasing*). E-tendering digunakan untuk pengadaan publik yang dilakukan melalui tender, sedangkan *e-purchasing* digunakan untuk pengadaan yang dilakukan melalui pembelian.

Implementasi *e-procurement* diharapkan akan meningkatkan kompetisi dalam pengadaan publik dan mengurangi belanja pemerintah, dengan kata lain meningkatkan efisiensi. *e-procurement* akan memungkinkan adanya komunikasi yang lebih baik antara pembeli dan penyedia sehingga komunikasi yang lebih baik antara pembeli dan penyedia sehingga memfasilitasi bentuk pengadaan manual dengan meningkatkan pertukaran informasi yang lebih baik antar kedua belah pihak. Selain itu penggunaan yang lebih baik atas *e-procurement* membantu memberikan cara baru dan mudah bagi pengoprasian pengadaan manual.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian (Budi Zulfachri dan Ranti Utami, 2018) Pengaruh kompetisi dalam *e-procurement* terhadap nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah. Perbedaan dengan replikasi adalah pada penelitian terdahulu objek penelitian mengarah pada layanan pengadaan secara elektronik kota tanjungpinang, pada penelitian ini objek penelitiannya adalah layanan pengadaan secara elektronik kabupaten lampung timur. Pada penelitian terdahulu pemilihan sampel dilakukan dengan secara sampel jenuh (*saturation sampling*) sedangkan penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

Faktor kompetisi yang dapat menjadi bahan pertimbangan unit layanan pengadaan (ULP) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah jumlah peserta untuk menghindari resiko kurangnya jumlah peserta dan apabila peserta kurang persyaratan yang telah ditentukan makan tender menjadi gagal dan harus dilakukan tender ulang. Jarak peserta yang dapat menyebabkan pada nilai

penawaran yang terlalu tinggi meningkat biaya transportasi dan biaya pendukung lainnya, nilai pekerjaan yang akan ditenderkan harus sesuai dengan harga pasar yang berbeda pada tiap tahunnya agar para peserta dapat menurunkan harga penawarannya dan lama waktu pekerjaan yang dapat mempengaruhi jumlah biaya yang harus dikeluarkan karena semakin lama waktu yang dibutuhkan maka pengeluaran tambahan akan semakin besar. Semua faktor dari kompetisi dapat menyebabkan kenaikan ataupun penurunan pada harga final pada proses pengadaan barang/jasa. Dengan latar belakang yang seperti ini, penulis ingin mengembangkan penelitian yang menggunakan model pengadaan kompetitif yang sebelumnya telah dikembangkan oleh peneliti terdahulu. Model ini melihat pengadaan dalam *e-procurement* dari tiga sisi yang berbeda melainkan dari banyaknya jumlah peserta tender, nilai pekerjaan tender, dan lama waktu pekerjaan. Selanjutnya faktor-faktor kompetisi ini akan diuji untuk membuktikan pengaruhnya terhadap nilai penawaran pemenang. Dan nilai penawaran pemenang akan dicatat atas nilai belanja pemerintah. Dengan meninjau akan adanya pengaruh kompetisi terhadap besarnya nilai penawaran pemenang serta terjadinya peluang untuk mencapai efisiensi atas belanja pemerintah. Maka berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan judul “ **Pengaruh Kompetisi Dalam *E-Procurement* Terhadap Nilai Penawaran Pemenang Atas Belanja Pemerintah (Studi Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Lampung Timur)**”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan terarah maka penelitian membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021.

2. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah penawaran pemenang, dan untuk variabel independen yang akan diteliti adalah jumlah peserta tender, nilai pekerjaan tender, dan lama waktu pekerjaan.

1.3 Rumusan Masalah

Sebagaimana penelitian ini berusaha mengetahui pengaruh kompetisi dari sisi jumlah peserta tender, nilai pekerjaan tender dan lama waktu pekerjaan terhadap nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah, maka penelitian ini akan mencoba menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah jumlah peserta tender mempengaruhi nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah?
2. Apakah nilai pekerjaan tender pada pekerjaan konstruksi mempengaruhi nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah?
3. Apakah lama waktu pekerjaan tender pada pekerjaan konstruksi mempengaruhi nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti dapat mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh jumlah peserta yang ikut serta dalam tender terhadap nilai penawaran pemenang tender.
2. Untuk menguji pengaruh nilai pekerjaan yang ditenderkan terhadap nilai penawaran pemenang tender.
3. Untuk menguji pengaruh lamanya waktu pekerjaan yang ditenderkan terhadap nilai penawaran pemenang tender.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang diperoleh antara lain:

1.5.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi belanja pemerintah.

1.5.2 Manfaat praktis

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan kinerja belanja daerah.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dan masyarakat oleh pemerintah daerah.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang positif dan sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima bab yang beruntun sebagai berikut:

BAB 1

PENDAHULUAN

pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan teori-teori untuk mendukung dalam penelitian ini, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV

METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan peneliti berdasarkan data dan studi keputusan yang telah dilakukan penulis sehingga dapat menarik dan memberikan saran.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan implikasi penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisi tentang referensi buku, jurnal dan skripsi yang dilakukan sebagai bahan kajian pustaka penelitian.

LAMPIRAN

Pada bagian ini berisikan data-data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan yang dikemukakan berupa tabel maupun gambar.